

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada dasarnya produksi beras nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Akan tetapi tidak ada stok cadangan untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu perlu mengimpor beras untuk menutupi stok cadangan. Hal ini tentu saja akan membuat asumsi lain bahwasanya Indonesia tidak mampu memproduksi beras sendiri dan hanya mengandalkan beras impor dari luar negeri.

Akan tetapi, pemerintah menyangkal hal ini dengan alasan stok beras cukup untuk kebutuhan pokok bagi masyarakat sebangsa Indonesia. Pemerintah berdalih, mengimpor beras demi mengejar kenaikan inflasi. Sebenarnya stok beras nasional ini berkurang. Karena pihak bulog tidak melakukan upaya pembelian gabah dari kalangan petani atau koperasi-koperasi petani. Karena mereka hanya membeli padi dari pedagang dan pengusaha.

Dan secara otomatis menimbulkan selisih harga yang tinggi dibanding harga dari petani. Dan jumlah yang dibeli Bulog tidak memenuhi jumlah standart stok nasional. Oleh karena itu letak kurangnya stok Bulog sekarang ini adalah disebabkan karena lambatnya Bulog membeli gabah-gabah petani pada masa panen raya.

Berdasarkan data yang ditemukan ternyata tingkat harga, produktivitas beras dan pendapatan petani di Indonesia tidak mengalami penurunan pada tahun 2010-2012, namun upah buruh petani mengalami stagnasi, artinya tidak ada

peningkatan, sementara itu tingkat kemiskinan juga sangat lambat dalam mengalami perbaikan.

Karena faktor-faktor tersebut impor dilakukan, dan bahwa Impor beras Thailand pada 2010-2012 menandai kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Penolakan tersebut karena impor beras dianggap sangat merugikan petani di Indonesia, dan melemahkan ketahanan pangan di Indonesia.

Dampak impor dirasakan oleh petani, dan masyarakat Indonesia. Kebijakan impor beras Thailand pada 2010-2012 membawa dampak diantaranya; hilangnya kesempatan petani untuk meraih keuntungan yang cukup baik pada masa panen dimana produksi sebenarnya surplus, dan harga meningkat, namun akibat impor, maka harga beras lokal turun, dan petani tidak mendapatkan keuntungan maksimal, karena beras lokal kalah murah dan kualitasnya oleh beras impor.

Kedua. Petani kehilangan keyakinan terhadap kebijakan pemerintah yang dalam hal ini lebih memilih keuntungan liberalisasi pasar, bukan kepentingan kekuatan harga pada petani, dan upaya penguatan ekonomi petani.

Ketiga. Daya saing baik produksi petani maupun pemasarannya kalah saing oleh adanya padi/ beras impor. Beras impor terus mengancam harga beras nasional di masa yang akan datang / periode selanjutnya. Sementara perbaikan sistem pertanian nasional tidak pernah benar-benar dijalankan.

## **B. Saran-saran**

Penulis ingin menyarankan kepada pemerintah/ pemegang kebijakan, agar kebijakan impor beras tidak dilanjutkan, karena jelas hal itu mengancam kemandirian pangan dan kesejahteraan bangsa. Untuk itu perlu rencana merevisi kebijakan impor beras dan digantikan dengan kebijakan penguatan sektor pertanian dan pengadaan pangan lokal.

Penulis merasa bahwa Indonesia memiliki potensi yang melimpah di bidang pangan dan dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan ketahanan dan ketersediaan pangan nasional yang berkelanjutan demi kepentingan rakyat sebesar-besarnya, dengan catatan Indonesia harus menerapkan manajemen perberasan nasional, yang berbasis pada 3 pilar penting, yaitu Revitalisasi, Diversifikasi, dan Reformasi Bulog.

Revitalisasi ini merupakan upaya yang bersifat membangun sektor hulu pertanian yaitu dalam hal peningkatan produksi beras. Langkah ini dilakukan melalui berbagai macam cara seperti reformasi system lahan, teknologi, dan peningkatan alokasi anggaran pertanian. Reformasi system lahan ini berarti keberpihakan pemerintah untuk memfasilitasi lahan kepada petani. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pemberian insentif bagi petani untuk memiliki lahan dan memudahkan dalam pengurusan sertifikasi lahan.

Reformasi system lahan ini berarti adanya penguatan regulasi untuk lahan pangan berkelanjutan berupa sanksi dan standar yang jelas dalam teknisnya tidak

hanya sebatas instruksi. Dengan penguatan ini akan mudah untuk menimalisasi alih fungsi lahan yang semakin meningkat jumlahnya.

Dalam hal teknologi, yang perlu dilakukan adalah menerapkan teknologi yang tepat guna untuk mendorong produktifitas. Misalkan penggunaan teknologi yang dinamakan bioperforasi yang diklaim dapat meningkatkan produktifitas sampai 2-3 kali lipat (LIPI,2010). Bioperforasi ini memanfaatkan mikroba unggul yang dapat menyuburkan tanah. Dengan teknologi ini apabila petani biasanya menggunakan kompos 1 hektar sebanyak 4-6 ton, dengan pupuk ini cukup menggunakan 500 kg.

Dalam hal anggaran pertanian, hal terakhir ini menjadi prioritas utama dalam mendukung revitalisasi pertanian. Alokasi pertanian yang hanya sebangsa Indonesia 2% perlu ditingkatkan menjadi minimal 5% agar program-program pertanian dapat lebih mudah dilakukan. Peningkatan anggaran ini nantinya juga bisa dimanfaatkan melalui insentif untuk diberikan kepada petani baik dalam bentuk keuangan, infrastruktur maupun pengembangan kompetensi petani.

Langkah selanjutnya adalah diversifikasi yang berarti melakukan penganekaragaman makanan selain beras. Diversifikasi ini digunakan untuk mengurangi konsumsi beras nasional yang saat ini tergolong tinggi.

Potensi untuk melakukan diversifikasi pangan sebenarnya terbuka dengan luas dengan mengingat beragamnya potensi hasil pertanian yang bisa sebagai substitusi produk beras seperti singkong, jagung, sagu, dan berbagai macam produk lainnya. Pemerintah memiliki peranan vital dalam rangka usaha ini. Yaitu melalui sosialisasi ke berbagai daerah untuk mengoptimalisasi pemanfaatan

keanekaragaman ini.

Dengan keragaman sumber bahan pangan yang dikonsumsi diharapkan dapat menekan impor pangan secara nyata dan mengurangi ketergantungan pangan dari luar negeri sehingga ketahanan dan kemandirian pangan nasional semakin tercapai.

Ketiga adalah reformasi Bulog, dalam hal ini dikhususkan pada penguatan fungsi dari Bulog. Penguatan ini akan memperbaiki sector tengah dan hilir beras yaitu menyangkut perdagangan dan stok cadangan beras. Secara nyata penguatan ini difokuskan pada peningkatan peran Bulog untuk menstabilkan harga beras, mengoptimalkan penyerapan beras petani, dan menjaga stok pangan nasional, dibandingkan pada upaya untuk menghasilkan keuntungan.

Langkah yang dilakukan dengan cara menguatkan regulasi mengenai hal itu yang memberikan kewenangan lebih pada Bulog. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan Antara fungsi pelayanan sosial dengan kepentingan komersial yang diemban. Selanjutnya, dari segi manajemen pengelolaan stok, Bulog juga perlu mengoptimalkan perannya.

Penyerapan beras petani harus lebih aktif dilakukan serta untuk harga pembelian beras perlu disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku tidak hanya bergantung HPP. Hal ini akan membuat stok Bulog semakin mamtap dan petani pun dapat mengambil keuntungan.